

SAR KERAHKAN SELURUH PERSONEL Tradisi Padusan Tidak Dilarang

KRETEK (KR) - Pemkab Bantul membolehkan tradisi padusan menjelang datangnya bulan Ramadan. Karena dalam SE Bupati Bantul No 452/01184/Hukum terkait PP-KM berbasis Mikro, tidak ada aturan pelarangan pelaksanaan padusan. Sementara Tim SAR Parangtritis menyiapkan puluhan personel mengawal tradisi padusan.

"Dalam SE yang ditandatangani Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Selasa (6/4) lalu itu berisi tentang pelaksanaan ibadah Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/Tahun 2021," ujar Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul Annihayah, Kamis (8/4).

Kendati tidak mengatur tradisi padusan, wisatawan atau masyarakat harus taat protokol kesehatan. "Dalam SE itu tidak



KR-Sukro Riyadi
SAR Parangtritis melakukan patroli di sepanjang pantai.

melarang tradisi padusan, tapi masyarakat yang mengikuti tradisi padusan menjaga prokes," harapnya.

Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihaknya telah mengajukan surat permintaan penambahan personel dari Satpol PP, Polres Bantul, TNI, Dinas Perhubungan, Kalurahan Parangtritis Satgas Covid tingkat kalurahan serta kapanewon.

Koordinator SAR Satlinmas Wilayah III Bantul, Ali

Sutanta Jaka Saputra, mengatakan skenario pengamanan tradisi padusan di Pantai Parangtritis sudah disiapkan. "Kita kerahkan seluruh personel SAR, karena tradisi padusan tidak hanya di Pantai Parangtritis namun sampai ke Pantai Depok," ujarnya.

Jajaran SAR Satlinmas Parangtritis menyiapkan anggota 69 personel untuk pengamanan pengunjung Parangtritis dan Depok.

(Roy)-f

9.000 Rumah di Sleman Belum Layak Huni

SLEMAN (KR) - Sekitar 9.000-an rumah di Kabupaten Sleman belum layak huni. Sekarang ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi. Rencananya penanganan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) secara bertahap dan tahun ini ada 603 rumah yang akan direhab melalui dana APBD Kabupaten Sleman, Pemda DIY dan Dana Alokasi Khusus

Kasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Suwarsono menjelaskan, sekarang ini jumlah RTLH yang belum tertangani ada sekitar 2.146 rumah. Sedangkan data yang masuk atas usulan dari kalurahan sekitar 9.600 rumah.

"Dari data yang masuk itu, belum tentu lolos semua karena ada verifikasi

lagi. Kemungkinan setelah nanti kami verifikasi, masih ada sekitar 9.000-an RTLH di Kabupaten Sleman. Dan itu nantinya akan dikategorikan rusak ringan, sedang dan berat," kata Suwarsono di kantornya, Jumat (9/4).

Menurutnya, penanganan RTLH ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Sejak Tahun 2010, setidaknya sudah ada sekitar 9.400 RTLH yang direhab, baik

menggunakan dana APBD kabupaten, Pemda DIY, pemerintah pusat, Baznas maupun CSR dari perusahaan.

"Kami juga sudah merehab 9.000 lebih rumah tak layak huni. Bagi rumah yang belum tertangani, akan kami re-hab secara bertahap baik menggunakan dana dari daerah, provinsi maupun pusat," terangnya.

Pemkab Sleman menargetkan setiap tahun ada sekitar 1.500 rumah milik

warga miskin yang direhab. Untuk tahun ini, ada sekitar 603 rumah yang akan direhab melalui dana APBD Kabupaten Sleman, Pemda DIY dan DAK. Sisanya masih menunggu program dari kementerian atau pemerintah pusat.

"Rinciannya APBD Kabupaten Sleman ada 390 rumah dengan bantuan Rp 15 juta dan DAK ada 147 rumah dengan bantuan Rp 15 juta. Sedangkan, provinsi ada 66 rumah dengan rincian 24 pembangunan baru dan sisanya peningkatan. Kalau dari provinsi ini nanti bentuknya material bangunan, tapi kalau Kabupaten dan DAK berwujud uang," paparnya. (Sni)-f

Kalitengah Lor Teraliri Air Bersih

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini meresmikan pembangunan jaringan air bersih di Padukuhan Kalitengah Lor Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan, Jumat (9/4). Peresmian dilakukan dengan menandatangani prasasti serta penggantian pita oleh Bupati.

Lurah Glagaharjo Suroto menjelaskan, sarana jaringan air bersih ini merupakan realisasi dari APBKel yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp 166.450.000. Sum-bah dana tersebut lalu ditambah lagi dengan dana swadaya dari masyarakat

Rp 15.600.000, sehingga total menghabiskan dana Rp 182.050.000. "Durasi pengerjaan selama 15 hari yang dikerjakan secara swakelola. Ada 140 KK yang dipasang meteran untuk jaringan air bersih di Kalitengah Lor ini," ujarnya.

Bupati mengapresiasi program pembangunan jaringan air bersih ini. Sebab, melalui program ini masyarakat tidak semata-mata menjadi objek pembangunan melainkan juga menjadi subjek dalam proses pembangunan itu sendiri. "Keberhasilan pembangunan jaringan air bersih



KR-Istimewa
Bupati Kustini mengucurkan air bersih untuk warga Kalitengah Lor.

ini merupakan buah dari komitmen para tim pelaksana, termasuk lurah, perangkat desa, Kelompok

Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan satuan pelaksanaan serta masyarakat," jelasnya. (Has)-f

Mendesak, Pekerja Terkaver Jamsos

BANTUL (KR) - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mendorong implementasi jaminan sosial (jamsos) berkembang pesat di Kabupaten Bantul. Hal ini mengingat perlindungan jamsos yang mengkaver pekerja-pekerja sektor publik mendesak diberikan.

"Saya sangat apresiasi atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan jemput bola dalam memberikan sosialisasi dan pelayanan utamanya kepada pekerja sektor publik dan pekerja informal utamanya di Kabupaten Bantul. Saya harap kerja sama terus berlanjut demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan terkav-ernya jaminan sosial bagi warga Bantul," tegasnya usai pelaksanaan FGD dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Bersama antara Pemkab Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Ros In, Jumat (9/4).

Adapun kerja sama Pemkab Bantul dilakukan dengan 3 OPD yakni Disnakertrans, Dinsos dan P3A serta Dinkop UKM dan Perindustrian.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY, Asri Basir, mengungkapkan kegiatan ini merupakan MoU turunan dari kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda DIY beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data di Kabupaten Bantul memiliki potensi tenaga kerja sebanyak 200 ribu. Dari sekian ini yang sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ada 50 ribu.

"Tersisa potensi 150 ribu pekerja yang belum terkaver BPJS Ketenagakerjaan. Dimungkinkan mereka adalah pekerja sektor informal. Harapannya pekerja seperti nelayan, pedagang dan petani dapat mendaftarkan diri menjadi

peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng & DIY, Suwilwan Rachmat, menyampaikan selain pekerja informal BPJS juga menyasar relawan dan guru honoror. Pada 2021 ini BPJS memberikan santunan manfaat dengan nilai total Rp 9,5 miliar. (Aje)-f

Teten Masduki

Tetapkan Tujuh Target KemenkopUKM di 2024

YOGYA (KR) — Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2021 di Yogyakarta. Rakor ini dibuka secara daring oleh MenkopUKM Teten Masduki pada Rabu (7/4/2021). Sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 Kemenkop UKM turut hadir, serta perwakilan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dari berbagai daerah.

Rakor ini memiliki 2 (dua) agenda utama, yaitu pemantapan dan harmonisasi program dan kegiatan bidang KUMKM dengan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku koordinator kebijakan terkait, serta koordinasi kebijakan dan program bidang KUMKM antara pusat dan daerah.

Adapun tujuan Rakor ini digelar untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga yang terkait koordinator bidang Koperasi dan UMKM bersama dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan Bappeda di seluruh Indonesia.

Kegiatan koordinasi diperlukan terutama dalam rangka mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam Rakor tersebut, Teten menetapkan 7 (tujuh) target KemenkopUKM di tahun 2024. Antara lain peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 65 persen, peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen, dan peningkatan kontribusi ekspor UMKM menjadi 17 persen.

Selain itu, Teten juga menargetkan akan melahirkan 3500 startup berbasis teknologi dan Informasi, melahirkan 500 kope-rasi modern, menjadikan lebih dari 10 juta usaha mikro bertransformasi ke sektor formal, serta peningkatan rasio kewira-usahaan menjadi 4 persen.



Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki

"Upaya pencapaian target tersebut tidak akan berjalan tanpa koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tandas Teten dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, Teten juga menetapkan empat agenda transformasi KemenkopUKM yaitu transformasi usaha sektor Informal ke formal, transformasi ke dalam rantai pasok, transformasi digital dan modernisasi koperasi. "Semoga sinergi produktif ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional," ujar Teten.

Teten melanjutkan sambu-tannya dengan memaparkan tentang kondisi eksisting rasio kewirausahaan nasional, dimana saat ini hanya berkisar 3,47 persen, lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura 8,76 persen, Thailand 4,26 persen dan Malaysia 4,74 persen.

Populasi UMKM sebanyak 65.465.497 unit, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 60,51 persen. Dari jumlah tersebut, 98,7 persen merupakan Usaha Mikro dan porsi kredit perbankan yang diakses oleh UMKM baru mencapai 19,97 persen.

Disamping itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya 14,37 persen, lebih rendah dibanding negara lain (Singapura

41 persen, Malaysia 18 persen, Thailand 29 persen, Jepang 25 persen dan Tiongkok 60 persen).

Jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit, namun hanya berkontribusi terhadap PDB sebesar 5,1 persen. Dimana Koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional pada akhirnya belum dapat terwujud karena belum menjadi lembaga ekonomi pilihan masyarakat.

"Melihat proporsi dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional, maka diperlukan peningkatan kerja terpadu, harmoni dan sinergi antar K/L bersama dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, agar mampu mendorong pertumbuhan dan berkembangnya Koperasi dan UMKM," papar Teten.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa Rakor ini diadakan dalam rangka meningkatkan koordinasi pusat dan daerah sekaligus untuk memantapkan sinergi dan kesinambungan program dan kegiatan adaptasi dan transformasi Koperasi dan UMKM.

"Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergis, terutama dalam pembinaan Koperasi dan UMKM," ucap Arif.

Rakor menitikberatkan pada pemantapan pelaksanaan dan perencanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan 2022 pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sejalan hal tersebut, KemenkopUKM pada Tahun 2021 telah melaksanakan rintisan program/kegiatan dan pada Tahun 2022 akan melanjutkan kegiatan prioritas atas mandat PP Nomor 7 Tahun 2021. Mulai dari penanggung biaya, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum.

Selanjutnya pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan promosi UMKM, kebijakan implementasi alokasi 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM, serta penyelenggaraan basis data tunggal UMKM.

"Saya meyakini bahwa kita semua melalui forum ini akan mampu menyatukan langkah dalam rangka memberikan sumbangsih untuk adaptasi dan transformasi Koperasi dan UMKM, sehingga menjadikan Koperasi modern dan UMKM naik kelas," tutup Arif. (Ogi)

Penggunaan Tembakau Ancam Pembangunan

SLEMAN (KR) - Penggunaan tembakau merupakan ancaman serius bagi program pembangunan manusia dan ancaman bagi program pembangunan Indonesia secara umum. Upaya pengendalian tembakau perlu terus diperketat dan merupakan salah satu strategi yang menjadi mandat agenda pembangunan manusia yang digariskan dalam RPJMN. Hal ini dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok pemula dari 9,1% menjadi 8,7% pada tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dalam pembukaan 'Muhammadiyah High level Meeting' dengan tema 'Mewujudkan Pengendalian Tembakau untuk Melindungi Anak-anak dan Remaja Indonesia bagi peningkatan SDM Unggul dan Berkualitas', Kamis (8/4). Kegiatan dihadiri jaringan Muhammadiyah se-Indonesia dan jaringan pengendalian Tembakau Muhammadiyah/Muhammadiyah Tobacco Control network (MTCN).

Menko PKM meminta Muhammadiyah untuk memberikan masukan terkait substansi revisi PP 109 tersebut. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan, semangat pengendalian tembakau untuk melindungi anak dan generasi muda harus terus digalakkan karena merupakan misi dari Majelis Pembina Kesehatan Umat (MPKU). "Gerakan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang rasional, objektif dan pendekatan dakwah," ujarnya. (Fsy)-f

Anak Harus Mendapatkan Pelayanan Layak

BANTUL (KR) - Dalam mewujudkan Bantul yang layak anak, banyak komponen yang harus dipenuhi seperti sarana infrastruktur, kebutuhan air, tanggungan kesehatan dan komponen lain yang membantu dan mendukung mewujudkan kesejahteraan anak.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, saat membuka peninjauan perencanaan penganggaran urusan sosial dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak (SP3A) Bantul di Hotel KJ Jalan Parangtritis, Kamis (8/4).

Menurut Bupati warga yang tidak mampu, utamanya yang miskin per-manen harus dianggarkan

untuk kehidupan layak bagi mereka. "Kehidupan layak bagi anak-anak dan warga tidak mampu harus dianggarkan, sesuai visi-misi Kabupaten Bantul," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial P3PA Bantul, Didik Warsito SH, mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kesejahteraan masyarakat Bantul sebagian besar merupakan bagian dari adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mitra kerja dalam menanggulangi kemiskinan dan korban bencana, serta korban kekerasan sangat banyak dan membutuhkan koordinasi serta pembinaan yang sinergis. (Jdm)-f